

BENCANA ALAM DISINYALIR SALAH SATU PENYEBAB

# Harga Bawang Merah di DIY Masih Tinggi

**YOGYA (KR)** - Harga bawang merah di pasaran wilayah DIY dalam beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan cukup signifikan. Kenaikan harga bawang merah itu sebetulnya sudah mulai terasa sejak sebelum Hari Raya Idul Fitri. Kondisi cuaca yang tidak menentu (hujan dengan intensitas tinggi) serta adanya bencana alam seperti banjir di sejumlah daerah di Jawa Tengah, disinyalir menjadi salah satu penyebab naiknya harga bawang merah di pasaran.

"Sebetulnya tingginya harga jual bawang merah sudah dirasakan sejak sebelum Idul Fitri lalu. Karena berbagai faktor seperti banyaknya bencana di sejumlah daerah di Jawa Tengah serta hasil panen bawang merah di DIY yang kurang bagus menjadi penyebab mahalnya harga bawang merah di pasaran. Meski harganya masih tergolong tinggi, saya bersyukur pasokan relatif lancar," kata seorang pedagang bawang merah di Pasar Beringharjo, Yogyakarta,

Endang Mujiwati, Selasa (23/4). Endang mengatakan, harga bawang merah di pasar tradisional sampai saat ini masih tergolong tinggi. Karena para pedagang menjual bawang merah dengan kisaran harga Rp 30.000-Rp 50.000 perkilogram tergantung kualitas dan besar kecilnya barang. Misalnya untuk ukuran kecil bawang merah dijual kisaran Rp 30.000/kg. Sedangkan untuk bawang merah ukuran besar dijual kisaran Rp 40.000-Rp 50.000/kg. Sebagai pedagang pihaknya hanya bisa berharap harga segera stabil. Pasalnya jika harga dari distributor terus mengalami kenaikan, pedagang akan kerepotan.

"Kalau musim hujan biasanya bawang merah cenderung kecil-kecil, berbeda dengan sebelumnya (bukan musim hujan) ukurannya lebih besar-besar. Kenaikan harga bawang merah ini tidak terlalu berpengaruh ke penjualan. Buktinya warga masih banyak yang membeli. Rata-rata se-

tiap hari saya bisa menjual bawang merah sebanyak 300 kg," ungkapnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY Hery Sulistio Heman menjelaskan, salah satu pemicu kenaikan harga bawang merah, selain karena faktor cuaca juga diakibatkan petani yang belum mulai melaksanakan masa tanam. Biasanya masa tanam bawang merah dilakukan pada awal musim kemarau.

"Potensi bawang merah di DIY cukup bagus, hanya sekarang ini belum. Karena masih musim hujan, biasanya masyarakat lebih mengarah ke tanam padi," jelasnya.

Hery menambahkan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY sudah memberikan pendampingan dan dukungan kepada petani bawang agar produksi komoditasnya bisa optimal. Pihaknya akan melakukan pembibitan bawang merah di beberapa tempat agar petani lebih untung ketika panen. **(Ria)-d**



Endang Mujiwati sedang sibuk melayani pembeli di kiosnya yang ada di Pasar Beringharjo, Yogyakarta.

KR-Riyana Ekawati

## Hari Ini

Atas putusan itu, terdapat dissenting opinion dari tiga Hakim Konstitusi, yakni Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat.

Anggota KPU RI August Mellaz mengatakan, apabila dihitung paling lambat 3 hari setelah putusan MK dibacakan, maka pihaknya menetapkan pasangan presiden dan wakil presiden

terpilih pada Rabu (24/4) hari ini.

Menurutnya, durasi penetapan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih tidak terlalu ketat. Ia pun memastikan ada prosedur yang akan dilakukan mulai pukul 10.00 WIB. Selain itu, Mellaz mengungkapkan, acara tersebut akan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube KPU

RI dan stasiun televisi.

KPU akan mengundang sejumlah pihak mulai dari pimpinan lembaga negara, ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik hingga tiga pasangan calon untuk melakukan rapat pleno terbuka terkait dengan penetapan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Pemilu 2024. **(Ant/Obi)-f**

## UU Pemilu

wajib dipatuhi pejabat yang bersangkutan jika terbukti melanggar. "Selama ini, tanpa sanksi yang berat dan jelas, presiden dan para menteri bisa seenaknya memengaruhi pilihan politik rakyat dengan menggunakan fasilitas negara dan memanfaatkan kewenangannya secara terbuka untuk tujuan elektoral," ujar Yanuar.

Ketiga, pembagian bantuan sosial (bansos), beasiswa, sertifikat tanah, pembagian uang dan peresmian-peresmian sarana/prasarana yang berdampak pada masyarakat harus diatur ulang waktunya agar tidak tumpang tindih pada masa-masa kampanye. "Tentu saja masih banyak aspek lainnya yang harus direvisi dalam UU Pemilu, termasuk lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku politik uang dalam pemilu. Fenomena ini harus dicari akar masalahnya agar konstruksi UU Pemilu mampu menjawab soal ini," tuturnya.

Ia menekankan, fasilitas negara dan program-program pemerintah yang instan, seperti bansos dan sejenisnya, tidak boleh lagi disalahgunakan untuk tujuan politik praktis. "Pemilu 2024 memberikan pelajaran sangat berharga, pemilu yang tidak jujur dan tidak adil akan melahirkan kecurangan yang terus berulang karena penyalahgunaan wewenang ini," ucapnya.

Sebelumnya, Senin (22/4), Ketua MK Suhartoyo menyebutkan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, peraturan KPU (PKPU) maupun peraturan Bawaslu. Hal itu pada akhirnya memim-

bulkan kebutuhan bagi penyelenggara pemilu, khususnya bagi Bawaslu dalam upaya penindakan terhadap pelanggaran pemilu.

Demi memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaksanaan pemilu maupun pilkada selanjutnya, kata Suhartoyo, pemerintah dan DPR ke depan perlu melakukan penyempurnaan terhadap UU Pemilu, UU Pilkada maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan kampanye, baik berkaitan dengan pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana pemilu.

Anggota Komisi II DPR RI Guspari Gaus sepakat UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu perlu dilakukan revisi sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan putusan MK atas perkara PPHU Pilpres 2024. "Pendapat yang diberikan MK, UU Pemilu belum memberikan pengaturan terkait dengan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye yang dilakukan sebelum dan setelah masa kampanye dimulai memang harus diperjelas dan dimasukkan secara rinci di UU Pemilu," kata Guspari.

Menurutnya, revisi UU Pemilu adalah sebuah keniscayaan guna melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan. "Apalagi Pemilu 2024 yang dinilai dan dirasakan banyak kalangan berjalan dengan penuh kontroversi dan menimbulkan spekulasi terkait dugaan berbagai pelanggaran, pengurangan dukungan dari aparat sipil negara 9ASN) kepada

paslon tertentu, makin terangnya politik uang dan lain sebagainya," ujarnya.

Ia lantas menyinggung sejumlah masalah pada Pemilu 2024 yang tidak ada di Pemilu sebelumnya, di antaranya Satpol PP di Garut Jawa Barat, yang menyatakan dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

"Padahal, Pasal 283 ayat (1) UU Pemilu telah menyebutkan larangan bagi pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan pegawai negeri serta ASN untuk mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye," ucapnya.

Kemudian, lanjutnya, masalah Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang dinyatakan melanggar etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Barubaru ini juga kembali diadukan dengan dugaan pelanggaran etika atau dugaan asusila. Persoalan ini juga menjadi catatan penting terhadap integritas penyelenggara pemilu.

Untuk itu, Guspari pun mendorong agar anggota DPR RI periode 2024-2029 melakukan revisi UU Pemilu untuk menyempurnakan dan menutup celah kekurangan bagi pelanggaran pemilu yang tidak bisa ditindak secara hukum maupun administratif. "Bisa diatur secara lebih rigid untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu," kata anggota Badan Legislasi DPR ini. **(Ant/Obi)-f**

## Risiko

Dampak nyata yang mulai dirasakan pada perekonomian makro adalah kenaikan harga barang impor, dan biaya produksi pada manufaktur yang berbasis bahan baku impor, yang berarti menambah risiko dan beban bisnis.

Meskipun pada sisi lain, kondisi ini menjadikan harga komoditas ekspor nasional relatif lebih kompetitif, namun sisi lain mendorong kerapuhan pada sektor riil dan konsumsi, bahkan berdampak pada sisi fiskal. Subsidi energi yang berbasis produk BBM impor akan memberatkan fiskal yang tahun ini sudah dikonstruksikan pada posisi defisit. Dengan demikian ada potensi defisit fiskal akan meningkat.

Bank Indonesia sebagai lembaga independen yang memiliki ketugasan menjaga stabilitas nilai rupiah, perlu langkah cepat agar kepercayaan terhadap rupiah dapat dipertahankan. Meskipun ditengerai sumber permasalahan dari faktor eksternal,

namun kebijakan progresif perlu dipertimbangkan.

Para pelaku usaha skala UKM yang berpotensi ekspor, tidak serta merta mendapat rezeki nomplok. Daya saing produk industri yang berhadapan dengan produk kompetitor khususnya produk dari Tiongkok menjadikan depresiasi rupiah bulan ini bukan sebagai momentum untuk mendulang profit.

Bagi masyarakat luas pada posisi sebagai konsumen mulai terkena dampak. Kebutuhan barang elektronik, otomotif, dan bahkan barang impor kebutuhan rumah tangga yang biasa dibeli lewat loka-pasar mulai merangkak naik. Daya beli terkoreksi. Pada kelas masyarakat berpenghasilan menengah dan atas, kondisi ini bisa bertahan dengan masih adanya tabungan. Namun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tidak ada langkah kecuali mengencangkan ikat pinggang

menunda konsumsi, ataupun merogoh kocek lebih dalam agar tetap bisa belanja kebutuhan rumah tangga.

Menyikapi kondisi ini, bagi masyarakat luas tidak perlu ikut berspekulasi pegang mata uang asing yang secara makro justru akan semakin menaikkan risiko bisnis dan ekonomi. Pola konsumsi terpaksa diubah, dengan berorientasi pada produk lokal. Dalam jangka pendek, layak ditempuh menunda belanja barang elektronik impor maupun produk sekunder impor lainnya. Sisi lain, pelaku usaha, khususnya UKM bisa menjadikan momentum ini untuk menaikkan daya saing produk agar mampu mensubsitusi produk impor, dan bahkan sebagai penguat untuk produk orientasi ekspor.

*(Penulis adalah pendidik pada Prodi Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Peneliti Inspec)-d*

## Digodok,

karena ini hasil dari ratas (rapat terbatas)," kata Hadi menjawab pertanyaan wartawan.

Ia menjelaskan, Satgas Pemberantasan Judi Online nantinya melibatkan seluruh kementerian/lembaga, yang terbagi atas beberapa aspek yaitu penegakan hukum, pengaturan ruang siber, dan pengawasan transaksi keuangan. "Penegakan hukum jelas kita akan melibatkan Polri, Kejaksaan, dan Kementerian Luar Negeri, karena kenapa Kemenlu, karena kita harus bekerja sama dengan luar negeri, mungkin membuat satu MoU. Ini mungkin satu bagian dari tugas yang akan kami lakukan," kata Hadi Tjahjanto.

Menurutnya, peran Kemenlu juga penting karena saat ini banyak situs/laman judi online yang servernya di luar negeri, termasuk juga bandar judinya juga sebagian besar ada di luar negeri. Untuk langkah awal, negara-negara yang menjadi sasaran ada di Kawasan Asia Tenggara. "Tadi disampaikan Pak Wamenlu, kita akan bikin MoU yang diperluas, bukan hanya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), tetapi kita juga akan bekerja sama bagaimana kejahatan teknologi informasi itu bisa diterapkan dalam kerja sama ini," kata Hadi.

Kemudian, untuk pengaturan ruang siber nantinya bakal melibatkan Kementerian

## Sambungan hal 1

Komunikasi dan Informatika dan BSSN. "BSSN juga memiliki kemampuan untuk mendeteksi di dalam situs-situs yang resmi itu, terkadang ada situs yang tersembunyi, situs-situs judi online. BSSN akan bekerja sama, karena yang punya hak (kewenangan, red) take down adalah Kominfo sehingga akan kerja sama," kata Menko Polhukam.

Terakhir, untuk aspek lalu lintas keuangan perbankan, Satgas Pemberantasan Judi Online melibatkan OJK dan PPKATK. "Itu tadi kuncinya, kalau 5.000 itu tadi kita buka, itu jaringannya akan ke mana-mana. Itu mudah untuk kita melakukan tindakan," kata Hadi.

Hadi menyebut OJK menemukan 5.000 rekening yang transaksinya janggal. "Anomalia apa? Itu frekuensinya besar, tetapi nilainya kecil. Karena apa? Ini terkait dengan apa yang ditemukan PPKATK. PPKATK mencatat sejak 2017 sampai dengan 2024 itu terjadi peningkatan judi online secara signifikan," kata Hadi.

PPATK pada 2023 menemukan 3,2 juta warga bermain judi online, yang 80 persen di antaranya bermain dengan nilai di bawah Rp 100.000. Kemudian, perputaran uangnya selama 2023 mencapai Rp 327 triliun (agregat).

**(Ant/San)-f**

## Bangkitkan

presiden dan wakil presiden. "Kami berpandangan, tidak terbatasnya kekuasaan presiden adalah akar dari berbagai rangkaian permasalahan yang selama ini dipertontonkan kepada kita dengan sangat jelas dan terang benderang," ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, sebenarnya, bangsa Indonesia sudah pernah memiliki niatan untuk membatasi kekuasaan presiden dan wakil presiden, tetapi gagasan itu hilang, terlupakan dan bahkan lenyap dari memori kolektif pada setiap pergantian periode kekuasaan di Indonesia. Gagasan itu berbentuk Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan.

"Kehadiran RUU Lembaga Kepresidenan menjadi sketsa tegas dan jelas bagaimana presiden dan wakil presiden bersikap dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dengan hak, kewajiban, dan larangan yang menyertainya," terang Lintang.

Oleh sebab itu, CLS FH UGM menolak lupa

## Sambungan hal 1

eksistensi RUU Lembaga Kepresidenan dan menuntut dengan tegas presiden dan wakil presiden RI terpilih untuk bersedia kekuasaannya dibatasi melalui peraturan perundang-undangan khusus.

Komisi III DPR RI untuk mengadakan kembali pembahasan RUU Lembaga Kepresidenan. Badan Legislasi DPR untuk menempatkan RUU Lembaga Kepresidenan pada daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas tahun 2024. Presiden dan DPR untuk mengesahkan RUU Lembaga Kepresidenan menjadi UU. Seluruh pembelajar Ilmu Hukum, terkhusus pembelajar Ilmu Hukum Tata Negara untuk mengawal dan mendukung gagasan pelaksanaan proses legislasi RUU Lembaga Kepresidenan hingga disahkan menjadi UU dan seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawal dan mendukung gagasan pelaksanaan proses legislasi RUU Lembaga Kepresidenan hingga disahkan menjadi UU. **(Dev)-d**

## Kejagung

Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Kapolda Kepulauan Babel, Danrem 045, Danlanal, Danlanud dan Forkopimda Kepulauan Bangka Belitung.

Amir mengatakan, dalam pengelolaan aset di lima smelter sitaan ini, Kejagung tidak hanya berkoordinasi dengan Kementerian BUMN tetapi juga dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia. "Kita juga akan merapatkan dengan BPKP, karena ini menyangkut banyak, apakah ini menyangkut smelter, pengelola dan lainnya," ujarnya.

Ditambahkan, kasus korupsi tata niaga timah ini juga banyak aspek, baik aspek



**Ferri Wicaksono, SIP, MA**  
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ekonomi dan Sosial  
Universitas AMIKOM Yogyakarta

**PERKEMBANGAN** militerisme dan dinamika global telah menjadi sumber kekhawatiran dan tantangan besar bagi stabilitas dunia. Persaingan geopolitik antara negara-negara dunia, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Ukraina, Israel, Palestina, dan sebagainya, telah menciptakan lingkungan yang tegang di arena

# Perkembangan Militerisme dan Dinamika Global



internasional. Persaingan ini sering kali melibatkan rivalitas dalam bidang militer, ekonomi, dan diplomasi. Misalnya, persaingan antara AS dan Tiongkok dalam hal pengaruh regional di Asia Pasifik telah menyebabkan peningkatan kegiatan militer dan sekuritisasi di wilayah tersebut.

Perkembangan global juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi dinamika militerisme. Isu-isu seperti perubahan iklim, migrasi massal, dan kemiskinan telah menciptakan tekanan tambahan pada keamanan nasional, memaksa negara-negara untuk memperkuat kemampuan pertahanan mereka untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.

Tidak hanya itu, dinamika ekonomi global juga berperan dalam pertumbuhan militerisme. Negara-negara dengan ekonomi yang kuat cenderung

memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengalokasikan ke sektor pertahanan mereka, sementara negara-negara yang kurang berkembang mungkin merasa perlu untuk meningkatkan pengeluaran militer mereka sebagai cara untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas domestik.

Di tengah semakin masifnya militerisme, kita perlu memahami bahwa militerisme, atau penekanan berlebihan pada kepentingan militer dan penggunaan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan konflik, dapat memiliki dampak negatif yang signifikan bagi sebuah negara, sebagai berikut:

**Pertama**, pengalihan sumber daya. Investasi yang besar dalam anggaran militer dapat mengalihkan sumber daya yang berharga dari sektor-sektor penting lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, infra-

struktur, dan pembangunan ekonomi. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memperburuk disparitas sosial-ekonomi di dalam negara.

**Kedua**, tantangan demokrasi. Militerisme sering kali menyebabkan peningkatan otoriterisme dan pengendalian pemerintah terhadap masyarakat sipil. Kekuatan militer yang besar dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan sipil.

**Ketiga**, ketegangan internasional. Kebijakan militeristik yang agresif atau provokatif dapat memicu ketegangan dan konflik dengan negara-negara lain, baik di tingkat regional maupun global. Ini dapat mengarah pada spiral kekerasan dan meningkatkan risiko konflik bersenjata yang merugikan bagi semua pihak yang terlibat.

**Keempat**, ketergantungan pada solusi militer. Militerisme cenderung memperkuat budaya konflik dan solusi kekerasan dalam menanggapi masalah keamanan. Hal ini dapat menghambat pencarian solusi damai dan diplomatik terhadap konflik, serta mengurangi ruang bagi dialog dan kerja sama internasional.

**Kelima**, memburuknya hubungan dengan masyarakat internasional. Negara-negara yang menganut militerisme sering kali mendapat kritik dari masyarakat internasional dan menjadi subjek sanksi atau isolasi diplomatik. Hal ini dapat merugikan reputasi negara tersebut dan membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam kerja sama internasional.

Berbagai gambaran kerugian tersebut tentu menjadi pertimbangan untuk menghin-

darkan militerisme sebagai sebuah pendekatan negara modern. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan salah satu negara dengan populasi terbesar, Indonesia memiliki kepentingan strategis yang penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara serta di tingkat internasional. Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Penting untuk mengadopsi pendekatan diplomasi yang kuat dan berkelanjutan. Negosiasi multilateral dan dialog antar-negara menjadi penting untuk meredakan ketegangan dan membangun kepercayaan di antara negara-negara. Organisasi internasional seperti PBB harus dipertahankan dalam memfasilitasi dialog dan penyelesaian konflik.

Selain itu, kolaborasi internasional dalam mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan wabah penyakit dapat membantu mengurangi ketegangan dan membangun kerja sama yang positif di antara negara-negara. Upaya bersama dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan memperkuat infrastruktur keamanan manusia dapat membantu mengalihkan fokus dari persaingan militeristik ke upaya-upaya yang lebih produktif dan inklusif.

Demikian semoga opini penulis dapat memperkuat semangat dan komitmen kita untuk turut serta menjaga perdamaian dunia.\*\*\*